

ABSTRAK

PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)

Oleh:

NAJLA ZAHIRA PUTRI

Latar belakang penolakan hak paten yang diajukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, yang didasarkan pada ketidakterpenuhan unsur langkah inventif dalam invensi yang diajukan. Yamaha mengajukan berbagai upaya hukum, termasuk gugatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan prinsip langkah inventif dalam hukum paten serta akibat hukum dari penolakan paten Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan bentuk hasil penelitian deskriptif dimana semua bahan hukum dan referensi yuridis dikumpulkan.

Hasil penelitian dalam Putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 permohonan paten Yamaha ditolak karena dianggap tidak memenuhi unsur langkah inventif. Yamaha berupaya membuktikan bahwa invensi mereka memiliki perbedaan signifikan dengan teknologi yang telah ada. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap berpendapat bahwa perubahan yang diajukan tidak cukup untuk dianggap sebagai langkah inventif. Keputusan ini diperkuat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, yang menegaskan bahwa standar langkah inventif harus dipenuhi secara substansial agar suatu invensi dapat memperoleh hak paten. Akibat hukum perusahaan tidak dapat menikmati hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk yang diajukan patennya. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan pasar dan keuntungan bagi Yamaha.

Kata kunci: Penolakan Hak Paten, Invensi, Langkah Inventif

ABSTRACT

REJECTION OF YAMAHA PATENT RIGHTS THAT DO NOT FULFIL THE INVENTIVE STEP BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (Study of Supreme Court Decision No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)

By:

NAJLA ZAHIRA PUTRI

The background of patent rejection filed by Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha by the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia, which was based on the non-fulfilment of the inventive step element in the proposed invention. Yamaha filed various legal remedies, including a lawsuit to the Commercial Court and cassation to the Supreme Court. This research aims to analyse the suitability of Decision No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 with the principle of inventive step in patent law as well as the legal consequences of Yamaha's patent rejection by the Directorate General of Intellectual Property of Republik Indonesia.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. With the form of descriptive research results where all legal materials and juridical references are collected.

The results of the research in Decision No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Yamaha's patent application was rejected because it was deemed not to fulfil the element of inventive step. The Directorate General of Intellectual Property remained of the opinion that the proposed changes were insufficient to be considered an inventive step. This decision was upheld by the Supreme Court Judges in the cassation judgement, confirmed that the inventive step standard must be substantially met for an invention to be granted a patent. As a legal result, the company cannot enjoy the exclusive right to manufacture, sell, or distribute its patent-filed products. This implies a potential loss of market and profits for Yamaha.

Keywords: Patent Rejection, Invention, Inventive Step